

Polisi versus Demonstran: Bertanah Air Satu, Indonesia (Sebuah kajian Ideologi)

Andika Witono*



Abstrak :

Setelah pemerintahan Orde Baru, karena dibukanya kran demokrasi oleh Presiden B.J. Habibie pada 1998, demonstrasi semakin marak. Walau terkadang melanggar etika, namun Pemerintah benar-benar konsekuen dalam pelaksanaan pasal 28 UUD 45. Yaitu hak mengemukakan pendapat. Di lain pihak, kepolisian dituntut untuk menjaga keamanan dan seringkali berhadapan langsung dengan demonstran yang emosional terkadang anarkis. Karena kedua belah pihak, sama-sama mempertahankan ideologi yang dianutnya, maka tentulah satu sama lain berseteru demi menegakkan ideologi tersebut. Benarkah media sebagai

pemberi berita juga harus menegakkan ideologinya? Dan memegang kunci keamanan dan perdamaian dalam memberitakan berita tersebut.

Kata kunci: *Ideologi, Polisi, Demonstran, Media, Komunikasi dan Perdamaian*

Pendahuluan

Judul di atas, merupakan cuplikan dari esensi isi Sumpah Pemuda. Walau peringatan Hari Sumpah Pemuda masih lama, namun sekedar untuk mengingat kembali bahwa isi Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut:

Pertama

Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.

Kedua

Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

Ketiga

Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Pada zaman itu, diperlukan pencetus dan penegasan dalam berbangsa dan bertanah air, sehingga lahirah Sumpah Pemuda. Bangsa Indonesia dijajah bertahun-tahun oleh bangsa Belanda, sehingga hak dan kebebasannya dipasung. Tidak ada kemerdekaan berpendapat bahkan untuk hidup layak sekalipun. Para pejuang kemerdekaan berperang melawan penjajah. Bergerilya memerangi penjajah dengan bermodalkan bambu runcing. Namun sekarang, kita sudah merdeka. Hak berpendapat diatur jelas dalam pasal 28, Undang-undang Dasar 45.

Hal ini mengingatkan kembali akan maraknya demonstrasi belakangan ini, terutama yang dilakukan para buruh. Ketika ada unjuk rasa, para polisi diturunkan untuk alasan keamanan. Baik mengamankan untuk kepentingan umum, maupun objek-objek vital negara. Yang mirisnya, para demonstran dan polisi berhadapan satu

* Dra. Andika Witono, MM, mahasiswa doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, beralamat di andikawitono@yahoo.com

sama lain. Seolah-olah saling menghadapi musuh bebuyutan. Padahal kedua belah pihak, kenal pun tidak. Namun kedua kubu sama-sama bertanahair, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Apakah pepatah “tak kenal maka tak sayang” sengaja tidak menyangkut di fenomena ini? Sehingga jika kekerasan perlu diterapkan, maka hati nurani tidak perlu bermain? Dan media, sebagai penyebar informasi harus menjaga netralitas dan memegang ideologinya?

Alasan berdemonstrasi?

Para buruh berdemonstrasi, turun ke jalan, untuk menunjukkan perasaan atau “uneg-uneg” yang kerap disampaikan melalui forum-forum resmi. Namun belum terealisasi oleh pemimpin kebijakan di negeri ini. Mereka tentunya mempunyai ideologi sendiri. Walau tidak muluk-muluk bak negarawan, namun para buruh mempunyai pandangan hidup untuk tetap “survive” di kehidupan sehari-hari. Menuntut kesejahteraan, adalah pemikiran yang mendasar yang ada di benak para buruh. Namun, suatu tantangan bagi pemerintah untuk membuat “kesejahteraan yang terukur dan memuaskan semua pihak”.

Pada tahun ini saja, demonstrasi buruh sudah tiga kali. Pada akhir Januari 2012 bahkan sempat menutup ruas jalan tol Cikampek. Yang merupakan salah satu denyut perekonomian wilayah Jabodetabek. Kerugian tidak terhitung lagi. Masyarakat umum yang pergi dan pulang dari Bandung menuju Jakarta, membutuhkan sedikitnya 8 jam untuk menempuh jarak lebih kurang 130 km. Sementara waktu tempuh yang normal hanya 2 jam.

Demonstrasi yang agak genting ketika pada akhir Maret 2012, karena DPR melakukan rapat paripurna mengenai berapa kenaikan BBM yang akan diimplementasikan. Walau tidak ada korban jiwa, namun bukan merupakan contoh yang baik.

Dan 12 Juli 2012, kembali mereka

berdemonstrasi untuk menuntut Pemerintah agar segera mengimplementasikan apa yang sudah Pemerintah janjikan pada demonstrasi-demonstrasi terdahulu.

Koran Kompas, 13 Juli 2012, pada halaman utama memberitakan dengan headline “Buruh Tagih Kesejahteraan: Kerja Layak Harus Diwujudkan”, bahwa kali ini buruh mengusung tiga tuntutan utama, yaitu pelarangan tenaga alih daya (*outsourcing*), menghapus praktik upah murah, dan menolak wacana buruh menanggung iuran 2 persen dari total 5 persen upah dalam program jaminan kesehatan mulai Januari 2014. Praktik alih daya dengan upah rendah yang eksploitatif membuat buruh tidak memiliki masa depan.

Dengan terancam kelangsungan hidup seseorang, tentulah membuat orang menjadi emosional, gampang marah dan cenderung anarkis.

Kajian Pustaka

a. Ideologi

Ideologi menurut John Hartley dalam buku *Communications, Cultural and Media Studies* menyatakan bahwa ideologi merupakan reproduksi dari hubungan sosial yang tidak merata dalam lingkup makna dan wacana.

Althusser (1971) dalam Hartley (2004: 106) yang mengatakan bahwa, ideologi merupakan mekanisme, yang merubah individu-individu menjadi subjek. Selanjutnya Hartley juga menyatakan, bahwa konsep ideologi telah menjadi titik sentral penelitian media secara khusus, dan komunikasi secara umum. Merupakan hal yang sangat berguna untuk memahami bahwa tidak hanya arti yang ‘natural’ yang melekat pada sebuah situasi atau objek, tetapi juga situasi dan objek telah dikonstruksi secara sosial – artinya selaras dengan kelas, gender, ras dan hal-hal lainnya.

Terlebih lagi, ideologi bukan merupakan benda, namun merupakan hal praktis yang aktif. Apakah itu perubahan situasi dari kegiatan sosial untuk mereproduksi indra-indra yang sudah diregulasikan, atau memang sedang berjuang untuk menahan terbentuknya suatu alternatif atau oposisi.

1. Ideologi para Buruh

Pada artikel Kompas di atas, digambarkan bagaimana buruh berjuang untuk mendapatkan suatu kehidupan yang layak. Bahkan meminta ditambahkan komponen acuan Kebutuhan Hidup Layak dari 60 butir, menjadi 86 hingga 122 butir. Tentu saja, ditolak oleh Menakertrans. Selain harus mengakomodir keberatan yang timbul dari pihak pengusaha, juga jasil dari survei dewan Pengupahan Nasional hanya menemukan empat butir komponen baru.

Dapat dikatakan ideologi politik para buruh haruslah merumuskan dalam satu kepentingan yang berisikan aspirasi mereka tentang kebebasan, kesetaraan, keadilan hukum, keadilan upah, dan jaminan kesejahteraan baik di masa kerja dan di masa pensiun. (<http://politik.kompasiana.com/2012/05/01/buruh-dan-karyawan-adalah-sama-sudah-saatnya-mereka-bersatu/>).

2. Ideologi Polisi

Polisi dalam menjalankan tugasnya sehari-hari didasarkan kepada Tribrata. Yang isinya sebagai berikut:

TRIBRATA KAMI POLISI
INDONESIA:

1. BERBAKTI KEPADA NUSA
DAN BANGSA DENGAN
PENUH KETAQWAAN

TERHADAP TUHAN YANG
MAHA ESA.

2. MENJUNJUNG TINGGI
KEBENARAN, KEADILAN
DAN KEMANUSIAAN
DALAM MENEGAKKAN
HUKUM NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA YANG
BERDASARKAN KEPADA
PANCASILA DAN UUD 1945.
3. SENANTIASA MELINDUNGI,
MENGAYOMI DAN
MELAYANI MASYARAKAT
DENGAN KEIKHLASAN
UNTUK MEWUJUDKAN
KEAMANAN DAN
KETERTIBAN

Dengan adanya demonstrasi, maka masyarakat umum, menjadi tidak nyaman. Cenderung was-was. Belum lagi jalanan yang macet total, sehingga menghabiskan waktu dan bahan bakar di jalanan, hanya untuk menempuh jarak tertentu. Ini semua karena adanya pemblokiran jalan oleh para buruh. Atas dasar pelayanan inilah, maka polisi harus bertindak tegas terhadap demonstran. Namun, ketika para polisi marah, dan memperlakukan para demonstran secara tidak manusiawi, maka tidak hanya rakyat Indonesia yang marah, tapi juga masyarakat dunia.

Suatu dilema bagi kepolisian. Ketika mereka juga dilempari batu, bahkan cairan kimiawi, mereka tidak dapat membalas. Hal ini juga menjadi tidak manusiawi bagi polisi.

b. Komunikasi dan Perdamaian

Prof. Dr. Alo Liliweri, M.S. dalam bukunya Komunikasi: Serba Ada Serba Makna, pada halaman 440 menyatakan

bahwa “konflik kekerasan biasanya dihasilkan oleh keterbelakangan sosial dan ekonomi, asumsi ini yang mendorong pembangunan ekonomi agar mencapai tingkat keberhasilan tertentu sehingga dapat mengurangi kekerasan antar-etnis. Sederhananya adalah jika orang cukup makan maka konflik akan reda”.

Dan pada halaman 447 dari buku yang sama dijelaskan mengenai Teori Kekuasaan. Teori Kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan yang telah berhasil memaksakan kehendaknya pada pihak lain. Kekuasaan itu dapat berwujud dalam, kekuasaan militer, politik, geografis, kekuasaan ekonomi, dan juga sosial kultural. Dalam pandangan teori kekuasaan, konflik kekerasan terjadi ketika ada ketidakharmonisan dalam pengelolaan kekuasaan. Hal ini dapat saja terjadi ketika satu kelompok berusaha memaksakan kehendaknya kepada pihak lain dan pihak lain menolak. Dalam contoh yang lain, negara yang lemah bisa runtuh, karena dia telah kehilangan kekuasaan untuk membatasi gerakan oposisi atau pemberontak. Dan ketika kita kehilangan kekuasaan, maka kita berpeluang besar melakukan tindak kekerasan.

Alat untuk **menyatukan** kekuasaan atau untuk mengubah perkembangan negosiasi:

1. Satu pihak menyanggupi pembayaran atau berjanji memberikan imbalan kekurangan.
2. Jaminan militer atau jaminan keamanan politik
3. Legitimasi melalui pengakuan

diplomatik.

4. Membangun diplomasi melalui penggunaan insentif dan tekanan
5. Memberikan sanksi ekonomi.
6. Melalui tekanan angkatan perang.

Karena seringnya negosiator kewalahan menghadapi pelbagai tuntutan para pihak yang bersengketa atau konflik, maka teori kekuasaan menawarkan manajemen konflik sebagai berikut:

1. Penggunaan kekuasaan.

Manajemen konflik dapat menjadikan: (1) orang atau lembaga – yang mempunyai kekuasaan terhadap objek sengketa/konflik – sebagai negosiator. Kekuasaan yang dimaksudkan dapat berlandaskan hukum positif atau kekuasaan berdasarkan sistem sosial atau kultural dari suatu masyarakat; (2) negosiator dapat pula “menggiring” para pihak untuk dapat mempersepsikan kekuasaan tertentu yang akan menyelesaikan sengketa ini jika mereka tidak dapat menerima cara-cara perdamaian yang ditawarkan; dan (3) negosiator dapat secara langsung mendistribusikan atau menjanjikan untuk mendistribusikan kekuasaan demi memenuhi rasa kesetaraan antara para pihak.

Website kode etik kepolisian Indonesia (<http://www.metro.polri.go.id/kode-etik-kepol>) menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dan kode etik kepolisian menyatakan bahwa, adanya polisi bukan saja bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga bertindak sebagai pelindung masyarakat. Kekuasaan yang diberikan kepada kepolisian bukannya absolut, tetapi ada norma-norma yang membatasi kekuasaan tersebut. Perlu dipertimbangkan pula bahwa segala pembiayaan operasional kepolisian dari Pemerintah, sebagai wakil rakyat.

2. Meminjam kekuasaan

Jika dalam metode penggunaan kekuasaan para negosiator langsung melibatkan "pemegang kekuasaan" sebagai negosiator, maka metode meminjam kekuasaan hanya "meminjam" orang atau lembaga yang mempunyai kekuasaan terhadap objek sengketa membantu untuk memberikan informasi, telaah, analisis, membagi pengalaman tentang masalah yang dihadapi. Para pihak diberikan pertimbangan kemudian didiskusikan bersama-sama dengan para negosiator. (Liliweri, 2011: 448)

Hanya dengan adanya saling hormat dan saling percaya yang merupakan nilai-nilai utama, antara kelompok masyarakat dan kepolisian, maka hubungan kedua kelompok dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Jika terjadi kekerasan antara pihak kepolisian dan masyarakat, akan mengakibatkan situasi yang rumit. Kekerasan kerap muncul antara kepolisian dan masyarakat ketika adanya situasi yang menggenting.

Dari segi penegakan hukum, memang ada dasar hukumnya bagi kepolisian untuk melakukan kekerasan. Baik itu berupa pemaksaan, maupun yang berujung kematian sekalipun.

Usaha untuk meminimalisir kekerasan antara kepolisian dan masyarakat harus fokus kepada polisinya, karena polisi memang dilatih untuk mengatasi situasi serupa itu. Walaupun kontrol kekerasan itu ada di tangan kepolisian, namun rumitnya situasi kerap melebar sehingga mempersulit posisi kepolisian. (Sumber dari : US Department of Justice , Community Relation Service halaman 33).

3. BATNA: The Best Alternative to a Negotiated Agreement.

BATNA merupakan lembaga yang cukup tenar di Amerika Serikat. Lembaga ini telah menyiapkan sejumlah instrumen dalam rangka resolusi konflik ke arah perdamaian. BATNA sudah memberikan semacam perangkat penting bagi para pihak sebelum duduk di meja perundingan. Berdasarkan pengalaman, umumnya para pihak menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian dalam menciptakan perdamaian itu diserahkan kepada BATNA, bisa dengan konsesi tertentu atau tanpa konsesi sama sekali. (Liliweri, 2011: 448)

Pembahasan

a. Media sebagai Kunci Perdamaian atau Konflik?

Media sebagai penyebar informasi, mempunyai peranan penting pula, kepada

siapa media berpihak. Jelas dalam hal ini, netralitas media, sangatlah dituntut. Jika berulang kali menayangkan pemukulan terhadap demonstran, maka citra polisi akan jatuh. Dan menimbulkan kebencian serta keresahan bagi masyarakat. Di lain pihak, masyarakat perlu mengetahui juga, apa yang terjadi dengan unjuk rasa yang anarkis umpamanya. Seperti membakar ban bekas di tengah jalan, sehingga arus lalu lintas tersendat. Yang berujung dengan macetnya perekonomian pada hari itu. Termasuk juga, pelaksanaan sweeping dari pabrik ke pabrik, agar menunjukkan solidaritas untuk demonstrasi.

Ketika buruh memblokade jalan tol, media pula yang harus segera menayangkan betapa besar dampak kemacetan yang terjadi di jalan tol, baik menuju ataupun dari Jakarta. Sehingga dampak itu, terlihat oleh pemerintah, pengusaha, buruh dan masyarakat umum lainnya.

Media benar-benar dituntut profesionalismenya untuk berlaku netral. Karena begitu memihak ke pemerintahan, maka para buruh bisa menjadi lebih geram. Dan sebaliknya, jika memihak ke para buruh, bisa menimbulkan kegelisahan sosial dan berakhir dengan *chaos*. Beruntung jika tidak berakhir dengan kudeta atau situasi yang kurang nyaman di pemerintahan lainnya. Karena jika massa sudah bergerak, akan sulit dihentikan.

b. Kiat Menangani Konflik

Dalam perbedaan ideologi serupa ini, tidak ada kata lain, akan berujung konflik. Dan bagaimana konflik itu ditangani dengan baik. Konflik memang sulit untuk dihindari. Semakin kompleks suatu situasi, semakin banyak konflik yang ada. Apa yang dapat dilakukan, adalah melatih diri untuk menghadapi dan menangani konflik yang

ada.

Sebagai perbandingan, dari website Departemen Kehakiman Amerika Serikat dijabarkan mengenai pendekatan konflik manajemen dalam pendekatan terhadap demonstran. . Diakui memang tidak ada resep yang jitu untuk memelihara komunitas secara baik. Setiap komunitas mempunyai karakter yang unik, dan resolusi konflik terkait dari pengetahuan dan liku-liku dari komunitas, seperti masalah-masalah yang timbul dari kekhawatiran-kekhawatiran masyarakat dan juga prioritas-prioritas yang muncul di suatu komunitas. Masalahnya, kepolisian tidak dapat menangani bagian yang bukan menjadi ranahnya, seperti kemiskinan, pengangguran dan pendidikan yang tidak memadai. Namun, kepolisian tetap harus menyelaraskan masalah-masalah dan prioritas perubahan di masyarakat. Dan bersedia menawarkan bantuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan sumber konflik yang mempunyai dampak negatif di masyarakat.

Salah satu pelatihan yang harus diikuti oleh para polisi adalah membuat program manajemen konflik. Tujuan utamanya untuk memberitahu ketika merebaknya ketegangan yang berkaitan dengan kepolisian dan berpotensi konflik serta ketidakharmonisan dalam masyarakat. Program manajemen konflik termasuk: penilaian yang berkesinambungan mengenai situasi yang memicu konflik di masyarakat, pendekatan terhadap pemimpin-pemimpin masyarakat yang beragam, dan melatih para petugas kepolisian dalam hal pemecahan masalah dan mediasi.

Agar program di atas lebih efektif, seharusnya tidak saja kepolisian yang dilatih, tetapi juga masyarakat sipil yang tertarik untuk ikut serta dalam situasi seperti itu. Pendekatan

seperti ini merupakan langkah awal daripada metode tradisional penyelesaian konflik. Dan bisa jadi merupakan dorongan untuk mengembangkan inovasi pendekatan lainnya. Sebaiknya dalam program manajemen konflik, kepolisian harus merekrut perwakilan dari semua segmen masyarakat. Agar didapat beberapa pendapat dari berbagai lapisan masyarakat yang mendukung efektivitas program tersebut.

Membangun Spirit Keberhasilan

Sebuah artikel di Kompas, Sabtu 5 Mei 2012 yang lalu, berjudul *Dongeng Kebangkitan: Karena Darah yang Sama, Jangan Bertengkar*, yang dibuka dengan syair lagu “*Di Bawah Tiang Bendera*” ciptaan Franky Sahilatua. Secara penuh dalam satu bait itu, berbunyi sebagai berikut:

Pada tanah yang sama, kita berdiri. Pada air yang sama, kita berjanji.

Karena darah yang sama, jangan bertengkar. Karena tulang yang sama usah berpencar.

Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.

Dengan berbagai ragamnya penduduk Indonesia, juga ideologi yang kita anut, hendaknya harus diingat bahwa kita bertanah air satu, Indonesia. Ketika situasi meruncing, kembalilah ke khittah, apakah pantas tindakan kekerasan dilakukan? Apakah tidak ada jalan lain mengatasi konfrontasi yang terjadi. Semuanya menghendaki kesejahteraan yang merata.

Oleh karena itu, meja perundingan merupakan jalan yang terbaik. Berfikir, bersatu untuk mencari solusi. Dengan keresahan yang terjadi, terlihat bahwa pemerintah tidak mempunyai solusi jitu untuk memecahkan masalah di kalangan buruh. Sementara polisi dipasang di lini terdepan, menjadi tameng untuk menghadapi bangsanya sendiri. Polisi

tentulah tidak bisa bernegosiasi melintasi ranahnya. Bagaimana polisi bisa bernegosiasi dengan buruh, jika tidak memahami UU no. 13/2003 Ketenagakerjaan dengan baik? Polisi juga tentunya tidak dapat didudukkan sebagai wakil pengusaha. Karena kompetensi mereka memang bukan di bidang bisnis. Jadi, merupakan hal yang tidak tepat, untuk menyerahkan persoalan kepada polisi untuk menghadapi para demonstran, hanya dengan tameng “keamanan bangsa dan negara”. Akhirnya malah berbuntut, mengadu domba polisi dengan buruh. Dan itu bukanlah suatu tindakan yang terpuji.

Simpulan dan Saran

Dengan melihat besarnya penduduk Indonesia, maka negara ini masih sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berpotensi tinggi. Baik masyarakat, maupun jajaran kepolisiannya. Walau sama-sama bertindak untuk orang banyak, atau demi menjaga kestabilan nasional, jagalah emosi agar sama-sama tidak terpancing. Situasi suhu udara yang panas, haus, lapar yang menguasai kedua belah pihak bukanlah situasi yang mendukung perundingan. Jika harus berhadapan antara kepolisian dan demonstran, hendaknya terjadilah negosiasi “tingkat tinggi”. Artinya, seperti pepatah klasik mengatakan, kepala boleh panas, tapi hati tetaplah dingin. Kedua belah pihak tetap menyadari bahwa jika terjadi persengketaan, bahwa kita bernaung dalam satu bangsa, bahasa dan tanah air. Selesaikanlah semua di meja perundingan, bahkan kalau bisa di meja makan dan bukan di jalanan. Ternyata Jokowi melakukan hal ini ketika bernegosiasi pemindahan lapak-lapak PKL di kota Solo. Dia mengundang para pedagang kaki lima, makan siang gratis beberapa kali. Hanya semata-mata untuk merebut “hati” para pedagang tersebut.

Kedua, penyamaan persepsi ideologi untuk ke tingkat yang lebih tinggi, tentulah

harus dikedepankan. Tidak dari ideologi per kelompok. Sudah jelas perbedaan ideologi antara buruh dan polisi, namun mereka disatukan oleh ideologi Pancasila yang jauh lebih tinggi scope nya. Dalam hal ini, penekanan pada persamaan mutlak diperlukan dan bukan pada perbedaannya. Namun karena menyangkut kehidupan dan kesejahteraan kelompok mayoritas, maka negara terpaksa mengakomodir dengan cara-cara yang tidak elegan. Hukum tidak berjalan dengan baik, sehingga memaksa buruh turun ke jalan.

Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi meminta agar pemerintah konsisten menegakkan hukum, agar investor tidak ragu mewujudkan investasi untuk menarik informal ke sektor formal. Jika semua persoalan diselesaikan di luar jalur hukum dengan demonstrasi atau sweeping, sulit investor mau menanamkan modalnya di negara ini. Sementara, investor adalah orang yang dibutuhkan karena membuka puluhan peluang kerja.

Untuk menjadi lebih baik, selain pembenahan di bidang hukum, juga pendidikan dalam hal ini ideologi Pancasila, haruslah didengungkan kembali. Karena betapa ideologi kelompok sudah mulai menggeser ideologi kita sebagai bangsa Indonesia. Secara ekonomi saja, sudah mulai terjajah lagi, dengan serbuan barang-barang impor untuk kebutuhan primer, seperti beras, garam, gula, tepung, keledai, dan lainnya. Jika tidak segera dibenahi, bukan tidak mustahil kita akan kembali menjadi Indonesia yang diadu-domba dan dipecahbelahkan oleh bangsa sendiri.***

Daftar Pustaka

Sobur, Alex. Semiotika Komunikasi. Rosda, Bandung, 2004

Tyson, Lois. Critical Theory today, A User-Friendly Guide, Routledge, NY, 2006

Wayne, Mike. Marxism and Media Studies, Key Concepts and Contemporary Trends, Pluto,

London, 2003

Hartley, John. Communications, Cultural and Media Studies, The Key Concepts, Routledge, NY, 2002

Hardiman, F. Budi. Kritik Ideologi, Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan kepentingan Bersama Jurgen Habermas. Kanisius, Yogyakarta, 2009

Liliweri, Alo. (2011). Komunikasi: Serba Ada Serba Makna. Jakarta: Kencana

<http://www.metro.polri.go.id/kode-etik-kepol>

Kompas cetak, Jumat 13 Juli 2012, Artikel Buruh Tagih Kesejahteraan

Kompas, Sabtu 5 Mei 2012, Dongen Kebangkitan: Karena Darah yang Sama, Jangan Bertengkar.

Lundell, Dean. (2002). Kontekstualisasi Seni Perang Sun Tzu: Bagi Pebisnis dan Investor (Judul Asli: Sun Tzu's art of War for Traders and Investors. Jakarta: Grasindo

Azhari, A.A. (2011). Ganbatte! Meneladani Karakter Tangguh Bangsa Jepang. Bandung: Grafindo

Pickering, Peg. (2001). How to Manage Conflict = Kiat Menangani Konflik. Jakarta: Erlangga

Harefa, Andreas. (2006). Membangun Spirit Keberhasilan. Yogyakarta: Gradien

US Department of Justice, Community Relations Service, Principles of good Policing: Avoiding Violence Between Police and Citizens (Revised September 2003).

<http://news.viva.co.id/news/read/308024-polri-antisipasi-air-keras-di-demo-buruh-1-me>

(<http://politik.kompasiana.com/2012/05/01/buruh-dan-karyawan-adalah-sama-sudah-saatnya-mereka-bersatu/>).

<http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/green/detail.jsp?id=75087>